

Abstrak

Bendahara pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam pemotongan dan pemungutan pajak. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, bendahara pemerintah memerlukan pengawasan agar setiap masalah yang dapat muncul dapat teratasi serta dapat meningkatkan pemahaman bendaharawan dalam melaksanakan ketentuan pemotongan dan pemungutan yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dari bendahara pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan dan pemungutan serta kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan bendahara, dan juga untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami bendahara dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajaknya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan serta analisis data kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengolah informasi-informasi yang relevan dengan objek penelitian dari berbagai sumber. Metode penelitian lapangan dilakukan menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara untuk memperoleh data secara langsung dari objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara telah melaksanakan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun angka kepatuhan pelaporan bendahara masih sangat rendah yaitu sebesar 38% untuk kepatuhan penyetoran utang pajak tepat waktu dan 0% untuk pelaporan SPT Masa PPh pemotongan dan pemungutan. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan kewajibannya, bendahara memanfaatkan aplikasi perpajakan sehingga kesalahan-kesalahan pemotongan dan pemungutan dapat diminimalisir, namun karena masih kurangnya pengetahuan perpajakan bendahara sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan bendahara yang masih sangat rendah.

Kata kunci: pajak, pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan, bendahara pemerintah.

Abstract

Government treasurers have a very important role in efforts to collect state revenue from the taxation sector in tax withholding and collection. In carrying out these obligations, government treasurers need supervision so that any problems that can arise can be resolved and can increase the understanding of treasurers in implementing the provisions of withholding and collection carried out. This study aims to review the fulfillment of the Income Tax withholding and collection obligations of the government treasurer of the Sidenreng Rappang Regency Social Service to find out how the implementation of withholding and collection as well as compliance in depositing and reporting treasurers, and also to find out what are the obstacles experienced by treasurers in carrying out their tax withholding and collection obligations. This study uses qualitative and quantitative data collection and analysis techniques. The data collection method used is the literature method and the field research method. The literature method is done by collecting and processing information relevant to the object of research from various sources. The field research method is carried out using observation techniques and interview techniques to obtain data directly from the object of research. The results showed that the treasurer has carried out withholding and collection in accordance with applicable regulations, but the treasurer's reporting compliance rate is still very low, namely 38% for compliance with depositing tax debts on time and 0% for reporting Periodic Income Tax Returns for withholding and collection. This is because in carrying out obligations, the treasurer utilizes tax applications so that errors in deductions and collections can be minimized, but due to the lack of tax knowledge of the treasurer, it causes a very low level of treasurer compliance.

Keywords: tax, income tax, withholding and collection, government treasurer.